BAGAIMANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO?

HARDJANTO

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
(AMPD) Yogyakarta

Korespondensi Penulis: harjantojogja15@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyusunan rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat penulis Tarik kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Kerja disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas pada pengusulan program/kegiatan yang dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa dan kemudian disampaikan pada forum di tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan).

Kata Kunci: Renja; Disnakertran; Kulon Progo

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD (sekarang OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Renja Disnakertrans) Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Disnakertrans Kulon Progo, serta berpedoman

pada Renja Kementerian Ketenagakerjaan dan Renja Disnakertrans DIY. Renja Disnakertrans tahun 2020 disusun berdasarkan RKPD tahun 2020 dan merupakan penjabaran Renstra Disnakertrans tahun kedua dengan memperhatikan program prioritas RKPD serta sesuai dengan tugas fungsi Disnakertrans yang tertuang pada RPJMD 2017 – 2022. Selanjutnya Renja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dari uraian tersebut, maka dapat kita tarik suatu permasalahan yaitu “Bagaimana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.”

TINJAUAN TEORITIS

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 disusun berdasarkan RKPD tahun 2020 dan merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dengan memperhatikan program prioritas RKPD serta sesuai dengan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo yang tertuang pada RPJMD 2017 – 2022. Selanjutnya Rencana Kerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk hal-hal yang hubungan dengan masa depan. Definisi perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004: “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.” Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:10) Perencanaan adalah Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan, pengertian perencanaan menurut Susatyo Herlambang (2013:45) perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Todaro dalam Suryana (2010) pembangunan diartikan sebagai proses dimensial yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dengan demikian pembangunan idealnya

dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan system ekonomi dan social. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Ali Kabul dan Indra Trigunarjo (2017 : 29) mengatakan pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya aspirasi yang paling humanistic tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare).

Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor: a. kegagalan mekanisme pasar; b. Ketidakpastian masa datang; dan c. untuk memberikan arah pembangunan yang jelas (Mudrajad Kuncoro, 2018:10). Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92). Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, mendefinisikan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari satuan pemerintahan terendah hingga ke pemerintah daerah. Upaya-upaya pencegahan dini dimulai dari proses direncanakan, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal dan tepat waktu. Pertimbangan mengenai persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat diharapkan cepat teratasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Partisipasi masyarakat menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Made Widarta (dalam Irene, Astuti Dwiningrum Siti, 2011:50) partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatannya.

Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Penyelenggaraan Musrenbang khususnya untuk penyusunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun menjadi suatu hal yang cukup menarik karena kegiatan ini menjadi sebuah agenda rutin yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada tahapan perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat. Pelibatan Masyarakat pada kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik, oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini tulisan ini dilakukan observasi yang berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Dan melakukan wawancara langsung kepada staf di Dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kelalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari isu strategis dan permasalahan khas yang akan dialami oleh pemerintah daerah. Secara umum. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunannya dan harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tahun 2019 dirumuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 399/A/2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Program kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp. 3.277.121.131,00,- meliputi 2 urusan, 6 program dan 22 kegiatan yaitu :

Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah anggaran sebesar Rp. 257.657.820, - dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan
 - 3) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Rp. 41.568.400,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

- 2) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan
- 3) Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
- c. Program Peningkatan Sarana / Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD, Rp. 265.913.100,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
 - 3) Kegiatan Penilaian Prestasi Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
- d. Program Perlindungan Ketenagakerjaan, Rp. 142.514.900,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pelayanan dan pengembangan Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja
 - 2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengupahan Kabupaten
- e. Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Rp.2.307.021.540,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Peningkatan produktivitas tenaga kerja
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal
 - 3) Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi pencaker
 - 4) Kegiatan Pelayanan kios three in one
 - 5) Kegiatan Rehabilitasi BLK
 - 6) Kegiatan Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)
 - 7) Kegiatan Pelayanan penempatan tenaga kerja
2. Urusan Transmigrasi

Program Penempatan Transmigrasi. Rp. 174.466.913,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Transmigrasi
- 2) Kegiatan kerjasama dan Penempatan Transmigrasi.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, juga tidak lepas dari perencanaan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas disusun dengan berpedoman Renstra Dinas dan berdasarkan usulan dari: a. masyarakat melalui musrenbang dari tingkat Kalurahan/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten; b. usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD baik melalui forum/musrenbang OPD tingkat Kabupaten; dan c. usulan dari Dinas sendiri. Dari ketiga usulan tersebut kemudian oleh Dinas dikompilasi dan sinkronisasi untuk ditentukan program yang merupakan skala prioritas.

Berikut Rencana Kerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Kulon Progo) tahun 2020, sebagaimana dalam tabel 1.

Tabel. 1 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo Rencana Kerja Tahun 2020

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 257.657.820, -
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Rp. 41.568.400,-
3	Program Peningkatan Sarana / Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Rp. 265.913.100,-
4	Program Perlindungan Ketenagakerjaan	Rp. 142.514.900,-
5	Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Rp. 2.307.021.540,-
6	Program Penempatan Transmigrasi	Rp. 174.466.913,-
	Jumlah	Rp. 3.277.121.131,00,-

Sumber: Disnakertrans Kulon Progo 2020

Dari tabel 1 diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Program kegiatan yang disusun oleh Dinas pada tahun 2020 mencerminkan program yang partisipatif dan berpihak kepada masyarakat, dari sisi besaran anggaran, banyak anggaran yang ditujukan untuk program dan kegiatan pada masyarakat, yaitu dari total anggaran Dinas sebesar Rp. 3.277.121.131,00,- sejumlah Rp. 2.307.021.540,- untuk Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan penyusunan perencanaan yang partisipatif. Partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan rencana kerja harus diimbangi dengan ikutsertanya/keterlibatannya dan bertanggung jawab atas suksesnya program.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat penulis Tarik kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Kerja disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas pada pengusulan program/kegiatan yang dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa dan kemudian disampaikan pada forum di tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Usulan/Program kegiatan dari masyarakat (*bottom up*) menjadi usulan yang diakomodir berdasarkan sekala prioritas dan tidak hilang dan digantikan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau program/kegiatan legislatif yang bersifat teknokratis, politis, dan *top down*. Melalui Musrenbang inilah dicari apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat. Walau akhirnya lebih banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat direalisasikan ke dalam program-program nyata di lapangan, namun sebagai alat adanya mekanisme penjangkaran aspirasi rakyat, musrenbang dinilai sebagai mediasi yang masih pantas untuk terus di jalankan.

Dari proses perencaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Kulon Progo khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas, dapat kita petik pelajaran berharga bahwa: Suatu kegiatan pada level Dinas tentunya harus direncana secara

matang, kegiatan mana yang paling prioritas dan capaiannya berdampak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penyusunannya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Keterbatasan anggaran sehingga terjadi plafonisasi anggaran sebagai sesuatu yang menyulitkan bagi penentuan skala prioritas program, sehingga tidak semua usulan dapat diampu oleh anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kabul dan Indra Trigunarso (2017), *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Arif Zainudin, Sri Sutjiatmi, *Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)* Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3– Nomor 1, April 2018,(Hlm.1-14).(https://www.researchgate.net/publication/324163018_Pembangunan_dan_Mekanisme_Sistem_Perencanaan_Studi_Kasus_Desa_Pengabean_dan_Desa_Karanganyar)
- Aryani Puspasari Abady (2013), *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1),*Perencanaan Partisipatif Dalam Perencanaan Daerah*. (https://www.researchgate.net/publication/318972745_PERENCANAAN_PARTISIPATIF_DALAM_PEMBANGUNAN_DAERAH)
- Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 3 No.11 Hal. 130-136, Tahun 2015, *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)* 82861-ID-efektivitas-sistem-perencanaan-pembangun.pdf (neliti.com)
- Irene,Astuti Dwiningrum Siti. 2011.*Desentralisasidan Partisipasi MasyarakatDalam Pendidikan*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Listyaningsih, 2014.*Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu:yogyakarta.
- Maripah, Jom FISIP Vol 4 No. 2 - Oktober 2017, *PerencanaanPembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa(RpjmDes) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. (<https://media.neliti.com/media/publications/208575-perencanaan-pembangunan-partisipatif-dal.pdf>)
- Meri Darlina ,Yannizar Yannizar,Siti Hodijah, *Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*, *Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.3 No.4. 2016. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/3527>
- Roehaenah, *Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu*, *Jurnal Ilmu Administrasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol 4 No. 1 (2019). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/REFORMASI/article/view/2649>.
- Soengkono Sidik, *Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah(Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep)*, *Pemkab. Sumenep*, 2013.<file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Temp/710-1809-1-SM.pdf>
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju Suryana,2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,Bandung : UPI
- Susatyo Herlambang (2013) *Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Program Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada PT. Taspen (Persero)*. 3–4.

- Yulia Ariesmawati, Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 6, No 2, pp 258-269, 2020.
<https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/968/1442>
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2019, *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 72.*